

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024
s/d Bulan Juni
BIRO TATA PEMERINTAHAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi							
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGARAAN KESTIMEMWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	178.571.250	7,00	7,00	0,00	12.095.900	6,77	11.959.200	6,70	0,07						
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	178.571.250	7,00	7,00	0,00	12.095.900	6,77	11.959.200	6,70	0,07						
1.1.1	2.10.11.5.01.0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	178.571.250	7,00	7,00	0,00	12.095.900	6,77	11.959.200	6,70	0,07	Testimoni dari BIG terkait asistensi teknis dan verifikasi batas kalurahan/kelurahan di DIY	https://drive.google.com/file/d/144tCnHMSAbMhVfWq8TIM57AKPvYrCXI/view?usp=drive_link	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan/kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penegasan Batas Kalurahan/Kelurahan tahun 2023 di DIY -Tersusunnya jadwal rencana pelaksanaan kegiatan -Terlaksanannya rapat persiapan pelaksanaan Pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan/kelurahan -Sampai tahun 2023 progres yang sudah berjalan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kulon Progo ; Penegasan batas 22 kalurahan dari 87 kalurahan + 1 kalurahan, Terbit Perbup 17 kalurahan (tanpa rekam BIG) 2. Bantul ; Pemasangan patok 21 kalurahan, terbit perbup 75 kalurahan (tanpa rekam BIG) 3. Gunungkidul : Penegasan batas 54 kalurahan dari 144 kalurahan, Terbit rekomendasi BIG 33 kalurahan 4. Sleman ; Penegasan batas 53 kalurahan dari 86 kalurahan, Terbit Perbup 15 kalurahan (proses supervisi BIG), Raperbup 4 kalurahan dan pemasangan patok pada 63 kalurahan 5. Yogyakarta ; Penegasan batas 27 kalurahan dari 45 kalurahan, Terbit Perwal 13 kalurahan, Raperwal 14 kalurahan -Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinkronisasi Batas Daerah Kab/Kota serta Penegasan/Penetapan Batas Kalurahan/Kelurahan di DIY <p>B. Sinkronisasi Garis Batas Daerah DIY</p> <ul style="list-style-type: none"> -Terlaksananya Rapat Koordinasi Batas Daerah antara Kabupaten Sleman DIY dengan Kabupaten Magelang Prov Jateng -Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Tinjauan Lokasi Pilar Batas Daerah Bantul-Kabupaten Gunungkidul -Tersusunnya Berita Acara Kesepakatan Pemindahan Pilar No PBU.82 Batas Daerah Kab Gunungkidul-Kab Bantul -Tersusunnya Berita Acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pilar Batas Daerah Kab Gunungkidul-Kab Bantul yang berdampak Pembangunan Jalan Baru Paket Kretek-Girjati - Terlaksananya pembangunan pilar PBU B2 Batas Daerah Kab Bantul-Gunungkidul -Terlaksananya koordinasi sinkronisasi garis batas daerah DIY-Jateng segmen Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang - Terlaksananya Koordinasi Batas Daerah DIY dengan Jateng pada segmen batas Kab Gunungkidul dengan Kab Wonogiri - Terlaksananya koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan persiapan rapat koordinasi batas daerah DIY-Jateng segmen kab sleman-kab magelang -Terlaksananya koord batas daerah DIY-Jateng pada segmen batas Kab Kulonprogo dengan Kab Magelang - Terlaksananya Rapat koord dan konfirmasi data penarikan garis batas daerah DIY-Jateng segmen Kab Gunungkidul-Kab Sukoharjo <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kecermatan dalam penyusunan jadwal kegiatan -Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD Tim penegasan batas Daerah/Desa di DIY -Efisiensi sebesar 136.700 yaitu perjadi 100.000, efisiensi ATK 26.700, kertas cover 10.000 -re desain: efisiensi jasa konsultansi Rp 35.568.750 	
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	136.292.400	13,49	13,49	0,00	17.824.600	13,08	16.456.700	12,07	1,01						
2.1	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	58.160.200	12,88	12,88	0,00	7.209.600	12,40	7.203.200	12,39	0,01						
2.1.1	2.12.02.1.01.0002	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	28.160.200	25,00	25,00	0,00	6.787.200	24,10	6.787.200	24,10	0,00	Testimoni dari LKSA yang telah terfasilitasi dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan adminduk	https://drive.google.com/drive/folders/1FMPcYNRhv2xgmeJ23ap2v1Y9hArsvnzE7?usp=sharing	Semua Kabupaten / Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	<p>1. Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi (DPA SIPD) : 6 Dokumen dari 80 Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (KK, KIA, KTP-EI, Akta Kelahiran) : 6 Dokumen dari 79 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pendaftaran penduduk non permanen dan rentan adminduk tahun 2024;</p> <p>2. Terlaksanakannya rapat kerja Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di DIY pada tanggal 23 Februari 2024 dengan peserta dari Dinas Sosial DIY, LKSA di DIY serta narasumber dari Ketua Forum LKSA DIY dan BPJS Kesehatan Yogyakarta;</p> <p>3. Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait pendaftaran penduduk non permanen pada bulan Maret</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>2024;</p> <p>4. Terlaksananya koordinasi dengan panti dan LKSA terkait fasilitasi anak panti di wilayahnya untuk dilakukan fasilitasi dokumen administrasi kependudukan pada bulan April 2024;</p> <p>5. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk melakukan jemput bola layanan adminduk bagi penduduk rentan dan disabilitas menindaklanjuti surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 400.6.1.7/5839/Dukcapil tanggal 20 Mei 2024 perihal Fasilitasi Layanan Adminduk Bagi Kelompok Penduduk Rentan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota Tahun 2024.</p> <p>6. Terlaksananya monitoring pelaksanaan layanan jemput bola bagi penduduk rentan dan disabilitas pada bulan Juni 2024;</p> <p>RB Tematik :</p> <p>1. Telah dilakukan perekaman dan pencetakan KTP-el bagi anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) di BPRSR Dinas Sosial DIY pada bulan Januari;</p> <p>2. Telah dilakukan rapat kerja Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan di DIY pada tanggal 23 Februari 2024 dengan peserta dari Dinas Sosial DIY, LKSA di DIY serta narasumber dari Ketua Forum LKSA DIY dan BPJS Kesehatan Yogyakarta;</p> <p>3. Terkoordinasinya fasilitasi dokumen kependudukan bagi Dinas Sosial dan LKSA yang memerlukan bantuan;</p> <p>4. Terkoordinasinya layanan adminduk jemput bola bagi penduduk rentan dan disabilitas di Kab/Kota;</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- tidak ada hambatan yang berarti</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY</p> <p>- terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan Dinas Sosial dan LKSA di DIY</p>
2.1.2	2.12.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	30.000.000	1,50	1,50	0,00	422.400	1,41	416.000	1,39	0,02	<p>Testimoni dari LKSA yang telah terfasilitasi dokumen administrasi kependudukan bagi penduduk rentan adminduk</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1FMPcyNRhvxgmeJ23ap2v1Y9hArsvmZE?usp=sharing</p>	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	<p>1. Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (DPA SIPD) : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Dokumen Hasil Kajian Pelaksanaan Kebijakan Adminduk : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan kajian terkait administrasi kependudukan;</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi internal terkait penyusunan kajian administrasi kependudukan;</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- tidak ada hambatan yang berarti</p> <p>- terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Januari sebesar Rp 6.400,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY</p>
2.2	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	78.132.200	13,94	13,94	0,00	10.615.000	13,59	9.253.500	11,84	1,75					
2.2.1	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	21.182.200	42,00	42,00	0,00	8.840.000	41,73	7.501.000	35,41	6,32	<p>Blangko KTP-el dikirim dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Distribusi blangko KTP-el dilakukan oleh Biro Tata Pemerintahan kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/162xExVqQWJ2y3Nk253VxdlZDexOTMBHd?usp=sharing</p>	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk : Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan fasilitasi terkait pendaftaran penduduk tahun 2024;</p> <p>2. Fasilitasi dan terdistribusikannya blangko KTP-el ke Dinas Dukcapil Kab/Kota pada bulan Januari 2024 untuk dukungan Pemilu pada bulan Februari 2024;</p> <p>3. Terfasilitasinya blangko KTP-el Kab/Kota di DIY untuk Pemilu sehingga permohonan KTP-el sebelum dan saat hari H pemilu dapat dilayani tanpa kendala;</p> <p>4. Terfasilitasinya blangko KTP-el Kab/Kota di DIY dari Ditjen Dukcapil saat kunjungan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri ke DIY pada bulan Maret 2024;</p> <p>5. Terfasilitasinya pengambilan blangko KTP-el dan terdistribusikannya kepada Kab/Kota pada bulan April 2024;</p> <p>6. Terjalannya komunikasi dengan Badan Penghubung Daerah DIY untuk dapat melakukan kerja sama terkait pengambilan blangko KTP-el dengan surat kuasa, anggaran pengiriman ke DIY disediakan oleh Biro Tapem (Surat No 400.12.2.1/1031, 24 April 2024);</p> <p>7. Terselenggaranya kegiatan rapat kerja "Dukungan Adminduk dalam Penanganan Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Kebijakan Legalisir Akta dan Dokumen Adminduk" pada tanggal 22 Mei 2024;</p> <p>8. Terfasilitasinya blangko KTP-el Kab/Kota di DIY dari Ditjen Dukcapil saat kunjungan Kepala Bagian Umum Sekretariat Dirjen Dukcapil Kemendagri ke DIY pada tanggal 30 Mei 2024;</p> <p>9. Terdistribusikannya blangko KTP-el kepada Kabupaten/Kota di DIY pada bulan Juni 2024;</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>- terdapat bantuan fasilitasi pengiriman blangko KTP-el dari Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ada kegiatan di DIY pada bulan Maret dan Mei 2024</p> <p>- belanja pengiriman blangko yang belum dapat direalisasi hingga Mei : Rp 1.339.000,-</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>- terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
2.2.2	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	56.950.000	3,50	3,50	0,00	1.775.000	3,12	1.752.500	3,08	0,04	https://drive.google.com/drive/folders/1Mz6xwJoE4sJPa0AbschCMp79YjG7Ng?usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Pendudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Hasil Sosialisasi Administrasi Pendudukan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan sosialisasi terkait administrasi kependudukan tahun 2024; 2. Terlaksananya koordinasi internal terkait sosialisasi administrasi kependudukan; 3. Terlaksananya sosialisasi Identitas Kependudukan Digital pada saat Upacara Hari Jadi ke 269 DIY tanggal 13 Maret 2024 dengan membuka stand layanan IKD di Mandala Krida; 4. Terlaksananya sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital ke OPD di Pemda DIY diantaranya Dinas Sosial DIY, Inspektorat DIY, Dinas Pertahanan dan Tata Ruang DIY pada April 2024; 5. Terlaksananya sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital ke kampus UPN Yogyakarta pada tanggal 13-14 Mei 2024 dan pada kegiatan Jambore PSKS Dinas Sosial di Prambanan pada tanggal 18 Mei 2024; 6. Terlaksananya koordinasi internal persiapan kegiatan sosialisasi adminduk yang akan dilaksanakan pada triwulan 3; Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan yang berarti - terdapat sisa belanja alat listrik (baterai) pada bulan Januari sebesar Rp 22.500,- Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	89.890.600	83,74	83,74	0,00	74.710.100	83,11	72.971.800	81,18	1,93					
3.1	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	35.218.000	69,00	69,00	0,00	24.057.000	68,31	23.473.000	66,65	1,66					
3.1.1	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	35.218.000	69,00	69,00	0,00	24.057.000	68,31	23.473.000	66,65	1,66	https://drive.google.com/drive/folders/1JkKuseaYcRybwMH-6pA7FSAMwemRx7B?usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Pendudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Kegiatan Pelayanan Terpadu Administrasi Kependudukan : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pelayanan terpadu pada tahun 2024; 2. Terlaksananya sosialisasi dan jemput bola layanan Identitas Kependudukan Digital pada tanggal 18 Januari 2024 di Kantor Pajak Pratama Kota Yogyakarta dan berhasil mengaktifkan 73 akun; 3. Terlaksananya rapat koordinasi pelaksanaan pelayanan terpadu perekaman KTP-el untuk mendukung Pemilu pada bulan Februari 2024; 4. Terlaksananya pelayanan terpadu perekaman KTP-el bagi Wajib KTP Pemula di Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 6 Februari 2024 dan berhasil merekam 627 siswa/i di 3 sekolah (SHK N 2 Pengasih, SHK N 1 Panjatan, dan SMK Masrif 1 Wates); 5. Terlaksananya pelayanan terpadu layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sleman yaitu di Universitas Amikom Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2024 dan berhasil mengaktifkan 587 IKD; 6. Tersedianya ribbon dan film KTP-el untuk pencetakan KTP-el untuk mendukung Pilkada Serentak Tahun 2024; 7. Terlaksananya koordinasi internal terkait pelaksanaan pelayanan terpadu yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024 dalam rangka mendukung Pilkada Serentak pada bulan November 2024; 8. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota dalam rangka percepatan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula untuk melakukan jemput bola perekaman di Kalurahan/Kelurahan atau Kapanewon/Kemantren mengingat adanya libur kenaikan kelas di bulan Juni 2024; Faktor Penghambat: - Jadwal kegiatan menyesuaikan kesanggupan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; - terdapat sisa belanja pengadaan ribbon dan film KTP-el sebesar Rp. 272.000 Faktor Pendukung: - terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Biro Tapem DIY dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan pelayanan jemput bola perekaman KTP-el di sekolah dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital
3.2	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	47.646.600	95,92	95,92	0,00	45.446.300	95,38	44.292.000	92,96	2,42					
3.2.1	2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	39.918.300	99,00	99,00	0,00	39.318.300	98,50	38.201.000	95,70	2,80	https://drive.google.com/drive/folders/1DtU7X78WN7dpPhmq3akG01M_Rx4Eda?usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Pendudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Itsbat Nikah : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan itsbat nikah pada tahun 2024; 2. Terlaksananya perjalanan dinas ke Kabupaten Gunungkidul dalam rangka koordinasi awal pelaksanaan itsbat nikah tahun 2024; 3. Terlaksananya koordinasi internal terkait pelaksanaan itsbat nikah tahun 2024; 4. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Gunungkidul, KIA Saptosari, PA Wonosari terkait pelaksanaan itsbat nikah; 5. Terlaksananya pemberkasan administrasi dan pembayaran panjar itsbat nikah pada bulan April 2024; 6. Terlaksananya kegiatan fasilitas itsbat nikah dan penerbitan kartu keluarga serta KTP bagi peserta itsbat nikah pada tanggal 16 Mei 2024 di Kalurahan Kepek, Saptosari, Gunungkidul; 7. Terlaksananya kegiatan evaluasi pelaksanaan itsbat nikah pada bulan Juni 2024; Faktor Penghambat:

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahami masyarakat terkait kepengurusan dokumen administrasi kependudukan - Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk oleh Dinas Dukcapil Kab/Kota namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya. - terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Januari sebesar Rp 117.300,- - terdapat sisa belanja pembayaran panjar sidang tsbat ke Pengadilan Agama Wonosari sebesar Rp 1.000.000,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota
3.2.2	2.12.03.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	7.728.300	80,00	80,00	0,00	6.128.000	79,29	6.091.000	78,81	0,48	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1mRqogSTihNixDGG-vs7mL310tbn5tE?usp=drive_link</p>	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Dokumen Kerja Sama Pemberian Insentif bagi Pemilik KIA di DIY : 1 Dokumen dari 3 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan terkait kerja sama pemberian insentif pada pemilik KIA di DIY pada tahun 2024; 2. Terinventarisasikannya data stakeholders yang masa kerjasamanya akan berakhir pada tahun 2024; 3. Terlaksananya rapat kerja KIA dan penandatanganan perjanjian kerja sama pemberian insentif kepada anak pemegang KIA pada tanggal 26 Februari 2024; 4. Terpublikasikannya insentif kerja sama yang diberikan stakeholder melalui media sosial Biro Tata Pemerintahan, Humas Pemda DIY serta melalui leaflet pada bulan Maret 2024; 5. Terdistribusikannya leaflet KIA saat pelaksanaan sosialisasi dan aktivasi IKD pada bulan April 2024; 6. Terdistribusikannya leaflet KIA saat pelaksanaan sosialisasi pada bulan Mei dan Juni 2024; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada hambatan yang berarti - terdapat sisa belanja alat tulis kantor sebesar Rp 18.000 - terdapat sisa belanja kertas dan cover sebesar Rp 19.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang baik antara mitra kerja sama / stakeholder yang memberikan insentif bagi pemegang KIA di DIY - Terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota
3.3	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	7.026.000	75,00	75,00	0,00	5.206.800	74,11	5.206.800	74,11	0,00					
3.3.1	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	7.026.000	75,00	75,00	0,00	5.206.800	74,11	5.206.800	74,11	0,00	<p>https://drive.google.com/drive/folders/1JkKuseaYcRYbWMH-6pA7FSAmwemRxB7j?usp=drive_link</p>	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil : Laporan dari 1 Laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil pada tahun 2024; 2. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ke Dinas Dukcapil pada bulan Januari terkait pencatatan sipil dan kesiapan mendukung Pemilu 2024; 3. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan Pemilu 2024 terkait penggunaan Dokumen Biodata Penduduk WNI untuk Pemilu 2024 pada tanggal 13 Februari 2024; 4. Terkumpulkannya laporan kinerja layanan administrasi kependudukan triwulan 1 2024 dari Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota; 5. Terlaksananya monitoring pelayanan Dinas Dukcapil pada bulan Ramadhan di bulan April 2024; 6. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota untuk melakukan jemput bola layanan adminduk bagi penduduk rentan dan disabilitas menindaklanjuti surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 400.8.1.7/5839/Dukcapil tanggal 20 Mei 2024 perihal Fasilitas Layanan Adminduk Bagi Kelompok Penduduk Rentan di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota Tahun 2024; 7. Terlaksananya rapat kerja pencatatan sipil bersama Pengadilan Tinggi Agama dan Kementerian Agama pada tanggal 24 Juni 2024; 8. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota terkait pelaksanaan buku pokok pemakaman pada kegiatan Forum Komunikasi Adminduk pada bulan Juni 2024; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tidak ada hambatan yang berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	351.737.000	64,34	64,34	0,00	225.007.000	63,97	209.696.400	59,62	4,35					
4.1	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	351.737.000	64,34	64,34	0,00	225.007.000	63,97	209.696.400	59,62	4,35					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
4.1.1	2.12.04.1.02.0001	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.482.200	83,40	83,40	0,00	31.914.200	82,93	31.289.200	81,31	1,62	https://drive.google.com/drive/folders/1ehFRH2G80RmS9NbeZ3B0xFGsJa_WVhVf?usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan (DPA SIPD) : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Perawatan Operasional SIAK : Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2024; Terlaksananya koordinasi internal pelaksanaan fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada bulan Februari 2024; Tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) semester II tahun 2023 pada bulan Maret 2024; Terlaksananya layanan Identitas Kependudukan Digital pada upacara Hari Jadi ke 269 DIY di Mandala Knida dan memastikan jaringan pelayanan berjalan dengan baik pada bulan Maret 2024; Terlaksananya koordinasi pembangunan sistem informasi fasilitas pendudukan rentan pada bulan April 2024; Tersusunnya Pembangunan Aplikasi Penduduk Rentan Adminduk / Fasilitas PPKS di DIY pada bulan Mei 2024; Terkoordinasinya penggantian router dan instalasi perangkat dari Ditjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Juni 2024; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> tidak ada hambatan yang berarti terdapat sisa belanja perawatan operasional SIAK sebesar Rp 10.000,- terdapat efisiensi belanja pembangunan aplikasi penduduk rentan pada bulan Mei 2024 sebesar Rp 500.000,- terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Mei 2024 sebesar Rp 57.000,- terdapat sisa belanja kertas pada bulan Mei sebesar Rp 8.000,- terdapat sisa belanja perawatan operasional SIAK bulan Juni 2024 sebesar Rp 50.000,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
4.1.2	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	313.254.800	62,00	62,00	0,00	193.092.800	61,64	178.407.200	56,95	4,69	https://drive.google.com/drive/folders/1m-u2hpg4npTTjjsHaABX5qXBg-zLFpq?usp=sharing	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan (DPA SIPD) : Dokumen dari 3 Dokumen 2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Data Pemilihan Pemilukada Tahun 2024 : Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Pelaksanaan Dukungan Pemda terhadap Data Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilihan Pemilukada Tahun 2024 : Laporan dari 1 Laporan 4. Dokumen Pemanfaatan Data Kependudukan (Berta Acara Pemanfaatan Data Kependudukan) : Dokumen dari 1 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan pemanfaatan data kependudukan pada tahun 2024; Tersedianya alat rekam KTP-el pengadaan tahun 2024 pada bulan Februari 2024 untuk membantu fasilitas alat rekam bagi Kabupaten/Kota yang membutuhkan; Terlaksananya rapat kerja pemanfaatan data kependudukan mengundang OPD di Pemda DIY dan Kabupaten/Kota (Dukcapil dan Dinas Kominfo) secara hybrid pada tanggal 20 Maret 2024 dengan mengangkat materi tentang "Prosedur dan Tata Cara Pemanfaatan Data Kependudukan"; Terlaksananya koordinasi persiapan pelaksanaan Sosialisasi Data Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilihan Pemilukada Tahun 2024 dan pelaksanaan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data Kependudukan pada bulan April 2024; Terlaksananya Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilihan Pilkada Serentak 2024 sebanyak 5 kali (4 Kota Yogyakarta, 1 Kabupaten Kulon Progo) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2024 dengan peserta PKK, Kalurahan, Karang taruna, dan organisasi masyarakat; Terlaksananya Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilihan Pilkada Serentak 2024 sebanyak 5 kali (Kota Yogyakarta 2 kali - 12 Juni 2024, Kabupaten Gunungkidul 1 kali - 13 Juni 2024, Kabupaten Sleman 2 kali - 26 Juni 2024) yang dilaksanakan pada bulan Juni 2024 dengan peserta PKK, Kalurahan, Karang taruna, dan organisasi masyarakat; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Februari sebesar Rp 77.600,- terdapat sisa belanja kertas dan cover pada bulan Februari sebesar Rp 8.000,- terdapat sisa belanja pengadaan alat rekam pada bulan Februari sebesar Rp 6.600.000,- terdapat sisa belanja honor narasumber kegiatan bimtek pemanfaatan karena ketidakhadiran narasumber sebesar Rp 2.000.000,- terdapat sisa belanja honor narasumber sosialisasi pada bulan Mei karena ketidakhadiran narasumber sebesar Rp 1.000.000,- <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	69.700.000	3,50	3,50	0,00	1.767.600	2,54	1.764.000	2,53	0,01					
5.1	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	69.700.000	3,50	3,50	0,00	1.767.600	2,54	1.764.000	2,53	0,01					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
5.1.1	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	69.700.000	3,50	3,50	0,00	1.767.600	2,54	1.764.000	2,53	0,01	Publikasi buku profil kependudukan melalui website biro tapem https://drive.google.com/drive/folders/1T3RCx8Wx8ugsizQPHu4BnyU5h8Y_eQf?usp=drive_link	Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun (DPA SIPD) 2. Dokumen Buku Profil Kependudukan Tahun 2023 : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Tersusunnya rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan pada tahun 2024; 2. Terlaksananya koordinasi internal terkait penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan pada bulan Februari; 3. Tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) semester II tahun 2023 dari Ditjen Dukkapol Kemendagri Maret 2024 secara bertahap; 4. Terlaksananya analisis kebutuhan data-data profil kependudukan tahun 2023 pada bulan April 2024; 5. Terlaksananya proses pengumpulan data pendukung lainnya dalam penyusunan profil kependudukan tahun 2023 pada bulan Mei 2024. 6. Terlaksananya proses koordinasi dengan tenaga ahli penyusunan profil kependudukan terkait pembahasan khusus pada Profil Kependudukan Tahun 2023; Faktor Penghambat: - tidak ada hambatan yang berarti - terdapat sisa belanja alat tulis kantor pada bulan Januari sebesar Rp 3.600,- Faktor Pendukung: - koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY - Tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukkapol Kemendagri Semester II Tahun 2023
6	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	41,58	41,58	0,00	20.296.150	40,59	17.337.350	34,67	5,92					
6.1	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	41,58	41,58	0,00	20.296.150	40,59	17.337.350	34,67	5,92					
6.1.1	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	50.000.000	41,58	41,58	0,00	20.296.150	40,59	17.337.350	34,67	5,92	Arahan Kepala Balai PMD Yogyakarta Dalam Rapat Kerja Perencanaan Pembangunan Desa berbasis data dan informasi https://tinyurl.com/KaBalaiPMD	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa (DPA SIPD) 2. Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan pembinaan manajemen pemerintahan desa - Terkoordinasikannya rencana pelaksanaan pembinaan manajemen pemerintahan desa dengan tema perencanaan pembangunan desa - Terlaksananya Rapat Kerja Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa dengan tema "Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Desa: Meningkatkan Efektivitas Melalui Pemanfaatan Data dan Teknologi Informasi pada tanggal 22 Februari, menghadirkan narasumber dari Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Wilayah Yogyakarta dan Pakar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari STPM/APMD' dengan sasaran Peserta adalah Perwakilan Pemerintah Kalurahan dari 4 Kabupaten yang memiliki nilai PAD stagnan di Tahun 2023. Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan pembinaan manajemen pemerintahan desa dengan tema perencanaan pembangunan desa - Terlaksananya Rapat Kerja Pembinaan Perencanaan Pembangunan Desa dengan tema "Perlindungan Lingkungan dan Sosial dalam Perencanaan Pembangunan Desa" pada tanggal 25 April 2024, menghadirkan narasumber dari RMC IV P3PD dan Lurah Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul dengan sasaran Peserta adalah Perwakilan Pemerintah Kalurahan dari 4 Kabupaten. Laporan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan pembinaan manajemen pemerintahan desa dengan tema manajemen pemerintahan desa - Terlaksananya Rapat Kerja MAnajemen Pemerintahan Desa dengan tema "Sinkronisasi Perubahan Kedua Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa" pada tanggal 7 Mei 2024, menghadirkan narasumber dari Ralai Pemerintahan Desa Kemendagri Wilayah Yogyakarta dan Pakar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari STPM/APMD' dengan sasaran 30 Peserta yang terdiri dari OPD Penguapung Desa di 4 Kabupaten (DPMKa) dan perwakilan kapnewon di 4 Kabupten. Faktor Penghambat: - Efisiensi honor narasumber dalam pelaksanaan raker pembinaan perencanaan pembangunan desa sebesar Rp200.000 - Efisiensi honor narasumber dalam pelaksanaan raker manajemen pemerintahan desa sebesar Rp200.000 - Efisiensi ATK sebesar 226.800 - Efisiensi Kertas dan Cavor sebesar 32.000 - Efisiensi paket meeting dalam kota pelaksanaan raker pembinaan manajemen sebesar Rp3.600.000 Faktor Pendukung: - Keaktifan audience dalam penyelenggaraan Rapat Kerja - Kesanggupan waktu dan kesesuaian materi oleh narasumber
7	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA	975.551.000	100,00	100,00	0,00	970.412.000	99,47	875.307.136	89,72	9,75					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
7.1	2.22.08.5.01	URUSAN KEBUDAYAAN Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	975.551.000	100,00	100,00	0,00	970.412.000	99,47	875.307.136	89,72	9,75					
7.1.1	2.22.08.5.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran	975.551.000	100,00	100,00	0,00	970.412.000	99,47	875.307.136	89,72	9,75	https://www.instagram.com/reel/C4PruitgUg?utm_source=ig_web_copy_link	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesenjajaran (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Peringatan Hari Bersejarah (Peringatan Hari Jadi DIY) : 1 Event dari 1 Event	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Jadi DIY pada Jumat, 26 Januari 2024 dan Selasa, 13 Februari 2024 yang dipimpin Bapak Sekretaris Daerah DIY di Ruang Rapat Sekretaris Daerah DIY, Komplek Kepathian. 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Jadi DIY pada Selasa, 20 Februari 2024 dan Rabu 28 Februari 2024 di Ruang Rapat Bhakti Praja, Lantai 3 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Peringatan Hari Jadi DIY pada Kamis 1 Februari 2024 dan Kamis 7 Maret 2024 melalui zoom meeting. 4. Terlaksananya Ziarah dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY Tahun 2024 ke Astana Kutagedhe, Astana Pajimatan Imogiri, dan Astana Girigondo pada tanggal 6 Maret 2024 yang diikuti perwakilan seluruh OPD Penda DIY 5. Terlaksananya Malam Tirakatan Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY Tahun 2024 pada Selasa, 12 Maret 2024 di Bangsal Kepathian, Komplek Kepathian yang juga diikuti secara daring dari Kalurahan dan kelurahan di DIY. 6. Terlaksananya Gladi Bersih Upacara Peringatan Hari Jadi DIY pada Jumat tanggal 12 Maret 2024 di Stadion Mandala Krida yang diikuti oleh perwakilan peserta upacara dari OPD di Penda DIY. 7. Terlaksananya Upacara Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY Tahun 2024 pada Rabu, 13 Maret 2024 di Stadion Mandala Krida sebagai inspektur upacara Bapak Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam X. 8. Penyusunan Tim Rapergub tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi DIY sesuai dengan amanat Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi DIY. 9. Koordinasi dengan Tenaga Ahli terkait penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi DIY 10. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Rapergub tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi DIY yang diselenggarakan pada Rabu 29 Mei 2024 secara daring 11. Terlaksananya penyusunan revisi draft Rapergub tentang Tata Cara Pelaksanaan Peringatan Hari Jadi DIY pasca Rapat Tim. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lomba tema dan design Logo Peringatan Hari Jadi Tahun 2024 tidak dilaksanakan, karena Gasar Hukum Perda belum ditetapkan. - Penetapan Perda No 2 Tahun 2024 tentang Hari Jadi DIY baru ditetapkan tanggal 8 Maret 2024 - Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2024 belum dapat dicairkan (dari pemerintah pusat), dapat mengajukan pengalihan dana dengan Silpa Tahun 2023 namun terbatas hanya untuk prioritas dan Dana Keistimewaan baru cair dipertengahan bulan Maret 2024 - Efisiensi sebanyak 38 Kalurahan tidak melaksanakan acara Malam Tirakatan Peringatan Hari Jadi ke 269 DIY Tahun 2024 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp22.750.000. - Efisiensi sebesar Rp. 46.600.000 (mamin dan tumpangan di 38 kal/kei Rp.45.600.000 dan pemusik Rp.1.000.000,- (anggaran pemusik difasilitasi Biro UHP) - Efisiensi belanja publikasi, mamin rapat, ATK, lurik, kertas cover sebesar Rp.10.869.864,- - Efisiensi di sesi Perubahan Dais Tahap I sebesar Rp.24.449.000,- (Lomba tema dan logo, tm, perajadin, sisa lelang) <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi bersama antara OPD terkait Tim Rapergub dan Tenaga Ahli 2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai
8	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	636.757.550	55,72	55,72	0,00	348.641.700	54,75	261.770.467	41,11	13,64					
8.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.247.200	62,24	62,24	0,00	19.264.400	61,65	18.842.000	60,30	1,35					
8.1.1	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	75,80	75,80	0,00	8.454.000	75,17	8.280.600	73,62	1,55	https://drive.google.com/file/d/1BM1MOIUapShEhQJqUWevsgOx1b0ly_2v/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 4 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Rencana Kerja Biro Tapem dan Pengumpulan data dan bahan Renja Tahun 2025 3. Pengumpulan data dan bahan Renja Tahun 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 5. Penyusunan Ranwal Rencana Kinerja Tahun 2025 6. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV 7. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV 8. Tersusunnya ROPK : 2 Dokumen dari 1 Dokumen 9. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II 2. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon II 3. Pengumpulan data dan bahan Renja Tahun 2025 4. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Daerah dalam rangka penyempurnaan Renja 2025 5. Penyusunan Ranwal Rencana Kinerja Tahun 2025 6. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV 7. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV 8. Terselenggaranya penyusunan ROPK keuangan dan fisik subkegiatan 9. Telah dilaksanakan revisi internal terkait Ranwal Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>6. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>10. Tersusunnya ROPK keuangan dan fisik Pergeseran tahap I dan sudah dientrykan pada aplikasi SIPD dan Sengguh</p> <p>11. Tersusunnya revisi materi dan data terkait tata pemerintahan bahan RKPD Tahun 2025</p> <p>12. Tersusunnya pohon kinerja berdasarkan RPJMD 2022-2027</p> <p>13. terselesaikannya form program kinerja SPIP</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu manajemen waktu karena perencanaan di awal tahun bertepatan dengan pembuatan seluruh laporan kegiatan dan kinerja perangkat daerah 2. Timeline perencanaan awal tahun sangat padat, sehingga pengisian aplikasi dan penyusunan dokumen waktunya sangat mepet 3. Terdapat efisiensi belanja ATK karena harga pada Mbiz berada di bawah DPA, total sebesar Rp59,400 <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi internal yang solid 2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 3. Keaktifan pegawai berkoordinasi dengan TAPD
8.1.2	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.000.000	58,70	58,70	0,00	4.072.400	58,18	3.922.000	56,03	2,15	<p>Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1BMIMOIUapSheHqUqWeVsgCx1bOly_2v/view?usp=sharing</p> <p>Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik</p>	<p>Kota Yogyakarta</p> <p>Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Rencana Kerja dan Anggaran 2025 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan 2024 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2025 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 2024 : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 sesuai dengan SHBJ 2025 dan ASB 2024 2. Telah dilaksanakan desk pra-RKA oleh internal SKPD dan TAPD 3. Telah tersusun revisi pra-RKA sesuai arahan TAPD 4. Telah diusulkan SHBJ yang belum terakomodir pada aplikasi SIPD Tahun 2025 5. Telah dikirimkan rekomendasi TIK Tahun 2024 berupa software dan hardware melalui aplikasi Peladan 6. Telah tercetak DPA Tahun 2024 dan dalam proses penandatanganan Tim TAPD 7. Telah dilaksanakan desk usulan SHBJ tahun 2025 oleh internal SKPD dan TAPD 8. Telah dilakukan Entry RKPD 2025 pada SIPD 2025 9. Telah melakukan rekam rasionalisasi anggaran tahun 2024 10. Telah dilaksanakan desk rasionalisasi anggaran tahun 2024 oleh internal SKPD dan TAPD 11. DPA Tahun 2024 telah di tandatangani oleh Tim TAPD dan sudah dikirimkan kepada SKPD yang membutuhkan 12. DPA Pergeseran Tahap I sudah selesai dientry pada SIPD dan sedang proses tandatangan PA dan TAPD. 13. Angkas Pergeseran tahap I sudah diselesaikan. 14. Angkas Pergeseran I sudah disesuaikan pada aplikasi Sengguh pada menu ROPK Keuangan 15. Telah dilaksanakan desk RKA RKPD 2025 oleh TAPD 16. Rancangan RKA RKPD 2025 telah diselesaikan dengan baik dan dikirimkan ke Bappeda sesuai dengan arahan pengurangan pagu. 17. Telah dilakukan Entry RKA RKPD 2025 pada SIPD 2025 sesuai pagu yang telah di sepakati oleh internal dan tim TAPD 18. DPA Pergeseran Tahun 2024 telah di tandatangani oleh Tim TAPD dan sudah dikirimkan kepada SKPD yang membutuhkan <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu manajemen waktu karena perencanaan di awal tahun bertepatan dengan pembuatan seluruh laporan kegiatan dan kinerja perangkat daerah. 2. Aplikasi perencanaan memiliki deadline sangat terbatas dan bersamaan dengan kegiatan perencanaan lainnya. 3. Terdapat sisa belanja ATK sebesar Rp54.400 4. Kondisi Bahan Komputer pada TW I di SKPD masih dalam keadaan prima dan optimal untuk kegiatan mobilisasi di SKPD sehingga akan diakomodir bulan Juni sebanyak Rp826.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi internal yang solid 2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan 	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																pekerjaan tepat waktu 3. Keaktifan pegawai berkoordinasi dengan TAPD
8.1.3	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	52,42	52,42	0,00	6.738.000	51,83	6.639.400	51,07	0,76	https://drive.google.com/file/d/1BMIMOIUapSheHqUqWevsgCk1bOly_2v/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (DPA SIPD) : 3 Laporan dari 3 Laporan 2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Tata Pemerintahan : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Monitoring dan Evaluasi Tahunan/Bulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengumpulan bahan dan data penyusunan LKJIP tahun 2023 2. Telah dilaksanakan desk penyusunan LKJIP oleh biro organisasi dan langsung di tindak lanjut dengan penyusunan Revisi LKJIP 2023 dan sudah dikumpulkan selanjutnya masih menunggu Reviu dari Inspektorat 3. Persiapan pembuatan konsep/bahan LKPJ 4. Telah dilaksanakan revisi LKPJ 5. Telah ter-upload nya hasil LKPJ ke Aplikasi sengguh.jogjaprovo.go.id 6. Telah diriviewnya LKPJ oleh Bappeda dan sudah diindikasikan dengan revisi LKPJ 7. Tereaksikannya LKJIP Tahun 2023 8. Tereaksikannya penyusunan LKPJ Tahun 2023 Urusan Tata Pemerintahan 9. Identifikasi evaluasi renja tahun 2024 TW I 10. Mulai menyusun evaluasi renja 2024 berdasarkan form yang ditentukan 11. Identifikasi evaluasi renja tahun 2024 TW II Faktor Penghambat: 1. Timeline penyusunan laporan yang waktunya sangat berdekatan menjadikan petugas harus bisa membagi waktu dengan sangat baik 2. Terdapat efisiensi belanja ATK karena harga pada Mbiz berada di bawah DPA, total sebesar Rp74.600 3. Terdapat efisiensi belanja Kertas dan Cover karena harga pada Mbiz di dibawah DPA total belanja sebesar Rp12.000 Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terseaksikannya laporan tepat waktu.
8.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	45.781.000	54,40	54,40	0,00	24.549.800	53,62	24.188.150	52,83	0,79					

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
8.2.1	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32.400.000	51,00	51,00	0,00	16.200.000	50,00	16.200.000	50,00	0,00	https://drive.google.com/file/d/1BMMIOIUapSheHqUqWeVsvjgCx1bOly_2v/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (DPA SIPD) : 6 Dokumen dari 12 Dokumen 2. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) setiap bulan : 6 Dokumen dari 12 Dokumen	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan bahan pertanggungjawaban sampai dengan Bulan Juni 2. Pengecekan validitas berkas pertanggungjawaban keuangan seluruh program pada SKPD sampai dengan Bulan Juni 3. Pembayaran Honorarium Tim Penanggungjawab Pengelola Keuangan Triwulan 1 Tahun 2024 4. Pembayaran Honorarium Tim Penanggungjawab Pengelola Keuangan Triwulan 2 Tahun 2024 <p>Faktor Penghambat:</p> <p>Pengumpulan dokumen mendekati akhir bulan tutup buku</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu.
8.2.2	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.108.800	76,63	76,63	0,00	3.908.800	76,51	3.720.100	72,82	3,69	https://drive.google.com/file/d/1n2LbAHAW70zAFR0RqCC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi petugas akuntansi dengan pengelola BMD biro, serta bendahara SKPD 2. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Bulan Juni <p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menu-menu dalam aplikasi SIPD penatausahaan keuangan belum sempurna sehingga pegawai harus membuat laporan keuangan sebagai pendamping 2. Belanja cetak masih menunggu opini BPK terkait Laporan Keuangan Tahun 2023 3. Terdapat belanja yang masuk identifikasi rasionalisasi sebesar Rp900.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
											menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.						
8.2.3	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.272.200	54,00	54,00	0,00	4.441.000	53,69	4.268.050	51,60	2,09	https://drive.google.com/file/d/1n2L8aHAW7I0zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (DPA SIPD) : 9 Laporan dari 18 Laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 6 Laporan dari 12 Laporan 2 Laporan dari 4 Laporan 4. Laporan Keuangan Semester dan Prognosis : 1 Laporan dari 2 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penatausahaan keuangan sampai dengan Bulan Juni 2. Penyusunan laporan keuangan TW 2 Faktor Penghambat: 1. Beberapa harga rincian belanja berada di bawah standar DPA 2. Terdapat belanja makan dan minum yang masuk identifikasi rasionalisasi tahun 2024 sebesar Rp600.000 3. Terdapat efisiensi belanja kertas dan cover sebesar Rp 8.000 4. Terdapat efisiensi belanja benda pos sebesar Rp 100 Faktor Pendukung: Etos kerja pegawai yang tinggi sehingga dapat menyelesaikan tugas cepat waktu	
8.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	51,40	51,40	0,00	5.848.000	51,30	5.782.000	50,72	0,58						
8.3.1	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	51,40	51,40	0,00	5.848.000	51,30	5.782.000	50,72	0,58	https://drive.google.com/file/d/1n2L8aHAW7I0zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 2 Laporan 2. Laporan Aset SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Inventarisasi ulang kondisi Barang Milik Daerah 2. Menyelesaikan administrasi honorarium pengurus barang pada TW 1 3. Menyelesaikan administrasi honorarium pengurus barang pada TW 2	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan													
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi												
																	<p>tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p>												<p>- Subbagian Tata Usaha</p> <p>3. Laporan Persediaan SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Banyak kondisi barang yang sudah mulai rusak (seperti komputer, laptop, printer, dll) 2. Aplikasi persediaan tahun 2024 belum siap dipergunakan 3. Terdapat sisa belanja barang komputer sebesar Rp66.000</p> <p>Faktor Pendukung: Dedikasi pegawai untuk tetap menjalankan tugasnya secara efektif dan menyelesaikan tepat waktu</p>
8.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.294.350	58,48	58,48	0,00	208.903.500	57,50	127.156.317	35,00	22,50																		
8.4.1	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.282.000	81,76	81,76	0,00	15.757.000	81,72	12.433.000	64,48	17,24	https://drive.google.com/file/d/1n2LbAHAW7i0zAFJRoQrC09910RiPFcu/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Paket dari 1 Paket 2. Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor : 1 Paket dari 1 Paket	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan instalasi listrik untuk kelancaran kegiatan SKPD pada bulan Juni 2. Penyediaan peralatan listrik untuk memperlancar kinerja pada bulan Juni 3. Pengaktifan kembali akun zoom biro untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD</p> <p>Faktor Penghambat: 1. Lampu sering mati, perlu pembaruan jaringan listrik keseluruhan gedung Unit 2. 2. Terdapat sisa belanja langganan zoom sebesar Rp3.300.000</p> <p>Faktor Pendukung: Kesiap-siagaan pegawai untuk menghadapi permasalahan apabila terjadi gangguan listrik</p>													

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan								
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)							Realisasi (%)	Deviasi						
8.4.2	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.423.400	44,01	44,01	0,00	15.290.200	43,16	14.006.300	39,54	3,62		Kota Yogyakarta	<p>1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (DPA SIPD) : 6 Paket dari 6 Paket</p> <p>2. Penyediaan Pembersih Tangan : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Tabung Pemadam Kebakaran : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>4. Alat Tulis Kantor : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>5. Kertas dan Cover : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>6. Bahan Komputer : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>7. Alat Kesehatan : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat terentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p>	<p>penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW7i0zAFJR0QrC09910RrPFcju/view?usp=sharing</p>						
8.4.3	4.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.683.000	61,00	61,00	0,00	4.672.000	60,81	2.360.275	30,72	30,09		Kota Yogyakarta	<p>1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (DPA SIPD) : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>2. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan rumah tangga dan bahan pembersih SKPD pada Bulan Juni</p> <p>2. Mengakomodir peralatan rumah tangga dan bahan pembersih pada Bulan Juni</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Terdapat sisa belanja perabot kantor sebesar Rp1.354.635</p> <p>2. Terdapat sisa belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor (sabun cuci piring & facial tissue) sebesar Rp20.500</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan menyelesaikan laporan secara tepat waktu</p>	<p>Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah istimewa</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW7i0zAFJR0QrC09910RrPFcju/view?usp=sharing</p>						

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																<p>mengantarkan barang pesanan</p> <p>2. Tanggungjawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu</p>
8.4.4	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.999.950	44,50	44,50	0,00	11.828.300	43,81	10.828.300	40,10	3,71	<p>Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1n2LBaHAW70zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing</p>	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	<p>1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Paket dari 2 Paket</p> <p>2. Bahan Cetak : 1 Paket dari 1 Paket</p> <p>3. Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan SKPD pada bulan Juni</p> <p>2. Mengakomodir barang cetakan dan penggandaan pada bulan Juni</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>1. Beberapa barang belum tersedia pada Mbizmarket.co.id sehingga pembelian dilakukan secara manual (offline)</p> <p>2. Terdapat sisa belanja bahan cetak sebesar Rp1.000.000</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan</p> <p>2. Tanggung jawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu</p> <p>3. Koordinasi dan kerjasama antar pegawai yang terjalin baikUntuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
8.4.5	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.532.000	40,40	40,40	0,00	6.122.000	39,42	6.122.000	39,42	0,00	https://drive.google.com/file/d/1n2LbAHAW70zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Bahan bacaan lokal : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Bahan bacaan nasional : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan pada SKPD pada Bulan Juni 2. Menyiapkan bahan bacaan surat kabar harian untuk memberikan informasi kepada pegawai untuk menunjang kegiatan SKPD pada Bulan Juni Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerja sama antarpegawai yang solid 2. Kecepatan penyedia dalam merespon kebutuhan Biro
8.4.6	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.374.000	61,20	61,20	0,00	155.234.000	60,08	81.406.442	31,51	28,57	https://drive.google.com/file/d/1n2LbAHAW70zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Indonesia	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (DPA SIPD) : 6 Laporan dari 12 Laporan 2. Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi setiap bulan : 6 Laporan dari 12 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah untuk Bulan Juni Faktor Penghambat: 1. Perjalanan dinas dilaksanakan sesuai dengan urgensi kegiatan 2. Efisiensi akomodasi dan uang taksir. Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu. 4. Pegawai menyelesaikan laporan tepat waktu

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan			
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi		
											penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.								
8.5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.058.000	55,00	55,00	0,00	3.848.000	54,52	3.848.000	54,52	0,00								
8.5.1	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.058.000	55,00	55,00	0,00	3.848.000	54,52	3.848.000	54,52	0,00	Data nilai SKM pada tahun n belum tersedia maka masih menggunakan data nilai SKM pada tahun n-1. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Yogyakarta sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera	https://drive.google.com/file/d/1n2L8aHAW7i0zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kaparewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (DPA SIPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan materi pada Bulan Juni 2. Mengakomodir kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan SKPD sampai dengan Bulan Juni Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai untuk mempergunakan materi sesuai dengan kebutuhan		

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
8.6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.977.000	49,58	49,58	0,00	86.228.000	48,45	81.954.000	46,05	2,40					
8.6.1	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.240.000	54,00	54,00	0,00	10.865.000	53,68	10.601.000	52,38	1,30	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW70zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (DPA SIPD) : 1 Unit dari 1 Unit 2. Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Biro Roda 4 : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sampai dengan Bulan Juni 2. Mengakomodir bahan bakar minyak untuk mobilisasi kendaraan dinas jabatan sampai dengan Bulan Juni 3. Perawatan kendaraan dinas Jabatan untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD sampai dengan Bulan Juni Faktor Penghambat: 1. Terdapat efisiensi belanja bahan bakar karena penyesuaian kebutuhan Biro, total sebesar Rp140.000 2. Terdapat belanja yang masuk ke dalam identifikasi rasionalisasi sebesar Rp125.000 3. Terdapat efisiensi pembayaran pajak kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp49.000 Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid 2. Antisipasi pegawai untuk merawat kendaraan
8.6.2	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.737.000	51,00	51,00	0,00	57.283.000	49,49	55.888.000	48,29	1,20	https://drive.google.com/file/d/1n2LbaHAW70zAFJRoQrC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (DPA SIPD) : 11 Unit dari 11 Unit 2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 : 4 Unit dari 4 Unit 3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : 7 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional sampai dengan Bulan Juni 2. Perawatan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD sampai dengan Bulan Juni 3. Mengakomodir bahan bakar minyak dalam bentuk voucher sampai dengan Bulan Juni Faktor Penghambat: 1. Mobilisasi yang padat mengakibatkan kekurangan kendaraan 2. Tidak ada hambatan berarti lainnya 3. Terdapat efisiensi pembayaran pajak kendaraan Dinas Operasional sebesar Rp13.500 Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai untuk menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan kegunaannya

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
8.6.3	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.000.000	43,55	43,55	0,00	18.080.000	43,05	15.465.000	36,82	6,23	pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan pelayanan publik di Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 92,6. Nilai SKM Biro Tata Pemerintahan Setda DIY menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.	https://drive.google.com/file/d/1n2LBaHAW70zAFjRoQrCC09910RrPFcju/view?usp=sharing	Kota Yogyakarta	Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (DPA SIPD) : 58 Unit dari 58 Unit 2. Air Conditioner : 22 Unit dari 22 Unit 3. Peralatan dan Mesin Rumah Tangga (Kulkas) : 1 Unit dari 1 Unit 4. Peralatan Komputer (Komputer/Notebook/Laptop dan Printer) : 35 Unit dari 35 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin pada SKPD sampai dengan Bulan Juni 2. Pemeliharaan Personal Computer (update software, penambahan memori, dan lain sebagainya) sampai dengan Bulan Juni 3. Pemeliharaan laptop sampai dengan Bulan Juni 4. Pemeliharaan Air Conditioner (isi freon, pembersihan unit AC) sampai dengan Bulan Juni Faktor Penghambat: 1. Kondisi Air Conditioner (AC) pada SKPD masih dalam keadaan prima dan optimal 2. Terdapat belanja yang masuk identifikasi rasionalisasi tahun 2024 sebesar Rp.2.595.000 Faktor Pendukung: 1. Keaktifan pegawai dalam melaporkan kerusakan sehingga dapat ditangani dengan cepat pula 2. Penanganan keluhan yang responsif

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
9	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	634.871.700	65,82	65,82	0,00	414.911.350	65,35	395.817.195	62,35	3,00						
9.1	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	337.350.000	45,99	45,99	0,00	154.762.550	45,88	142.571.754	42,26	3,62						
9.1.1	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	287.350.000	37,90	37,90	0,00	108.543.500	37,77	97.008.504	33,76	4,01	TESTIMONI PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD : KABUPATEN KULON PROGO Sebagai salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentu akan selalu berinteraksi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di berbagai hal dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo sebagai unit yang menampung tugas dan fungsi terkait kewilayahan, administrasi pemerintahan serta otonomi daerah dalam pelaksanaan kegiatannya tentu juga tidak lepas dari adanya koordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini dengan Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dalam setiap menanggapi koordinasi dan konsultasi dari Pemerintah Kabupaten (Kulon Progo) kami rasakan cukup baik. Sebagai contoh terhadap Pengusulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo baru-baru ini. Respon cepat serta koordinasi aktif sangat kami rasakan, sehingga tahapan demi tahapan proses dapat berjalan dengan baik dan mendekati selesai tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.	https://bit.ly/testimoni_pemerintahanumum	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum (DPA SIPD) : 2 Dokumen dari 5 Dokumen Laporan Monitoring Pilkada Tahun 2024 di DIY : 0 Laporan dari 1 Laporan Laporan Pengangkatan, Pemberhentian dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah : 1 Laporan dari 1 Laporan Laporan Sosialisasi Pilkada Tahun 2024 : 1 Laporan dari 1 Laporan Laporan Peresmian Pengangkatan Anggota dan Pimpinan DPRD Kab/Kota Hasil Pemilu 2024 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota Masa Jabatan 2019-2024 : 0 Laporan dari 1 Laporan Berkas usulan peresmian anggota dan pimpinan DPRD DIY hasil Pemilu 2024 dan peresmian pemberhentian anggota dan pimpinan DPRD DIY masa jabatan Tahun 2019-2024 kepada Menteri Dalam Negeri. : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Pilkada Tahun 2024 pada Rabu 3 Januari 2024 di Ruang Rapat Bhakti Praja, Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. 2. Terlaksananya rapat koordinasi Bantuan Keuangan Khusus Pilkada Tahun 2024 pada Rabu 8 Mei 2024 di Ruang Rapat Bhakti Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY 3. Terlaksananya rapat Persiapan Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Senin, 27 Mei 2024 secara daring <p>FASILITASI SOSIALISASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada hari Senin, 10 Juni 2024 di Balai Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Sleman dengan narasumber kali ini yaitu Ibu Retno Sudiyanti Anggota Komisi A DPRD DIY dan Ibu Noor Aan Mulihsloh Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Sleman. 2. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada Selasa 11 Juni 2024 di Balai Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pajangan, Bantul dengan narasumber yaitu Ibu Sri Hartati Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul dan KPH Purbodiningrat selaku anggota Komisi A DPRD DIY. 3. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada 20 Juni 2024 di Ruang Rapat Lantai 3 Dharma Praja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dengan sasaran masyarakat di Kemantren Mantrijeron, Kraton, dan Mergangan dengan narasumber yaitu Bapak Eko Suwanto Ketua Komisi A DPRD DIY dan Bapak Entzal Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Yogyakarta. 4. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada 19 Juni 2024 di Balai Kalurahan Purwosari, Kapanewon Giriasih, Gunungkidul dengan narasumber yaitu Ibu Christina Ari Retnaningsih Anggota Komisi A DPRD DIY dan Bapak Deni Tri Utomo, S.Ag Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Gunungkidul 5. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada 20 Juni 2024 di Ruang Rapat Lantai 3 Dharma Praja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan sasaran masyarakat di Kemantren Ngampilan, Wirobrajan, Gondomanan, dan Pakualaman dengan narasumber Bapak Eko Suwanto Ketua Komisi A DPRD DIY dan Bapak Huhamad Agus Yasin Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Yogyakarta 6. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada 21 Juni 2024 di Balai Kalurahan Triharjo Kapanewon Wates dengan narasumber yaitu Muh. Isnaini Bawaslu Kabupaten Kulon Progo dan Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Bapak Budi Priyana. 7. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada 25 Juni 2024 di Balai Kalurahan Banyuwaden, Kapanewon Gamping, Sleman dengan narasumber yaitu Komisi A DPRD DIY Bapak Sudaryanto, S.H. dan Bawaslu Kabupaten Sleman Bapak Arjuna Al Ihsan Siregar. 8. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 pada 27 Juni 2024 di Ruang Rapat Lantai 3 Dharma Praja Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan sasaran masyarakat Kemantren Tegalrejo, Jetis, dan Gedongtengen dengan narasumber yaitu Bapak Agung Nugroho Koordinator Divisi SDM, Diklat dan Organisasi Bawaslu DIY. <p>FASILITASI DAN KOORDINASI PERESMIAN ANGGOTA/PIMPINAN DPRD DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA/PIMPINAN DPRD.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo pada Jumat 16 Februari 2024 dan 19 Maret 2024. 2. Penyusunan Konsep Surat Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu anggota DPRD Kab. Kulon Progo dan telah disampaikan ke Biro Hukum melalui Nota Dinas Nomor : 100.1.4.2/799 tanggal 22 Maret 2024. Hal: Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 3. Penyusunan Konsep Surat Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua Dewan

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan telah disampaikan ke Biro Hukum melalui Nota Dinas Nomor : 100.1.4.2/938 tanggal 5 April 2024 Hal: Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024</p> <p>4. Penyusunan Konsep Surat Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan telah disampaikan ke Biro Hukum melalui Nota Dinas Nomor : 100.1.4.2/938 tanggal 5 April 2024 Hal: Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024</p> <p>5. Terbentuknya SK Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor: 100.1.4.2/889 tentang Penunjukkan Nama dan Susunan Personalia Tim Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten Kota Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2019-2024 tanggal 2 April 2024</p> <p>6. Terlaksananya Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu Tahun 2024 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD DIY dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2019-2024 pada Rabu 29 Mei 2024</p> <p>FASILITASI DAN KOORDINASI PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH</p> <p>1. Terlaksananya rapat koordinasi Pelantikan PJ Bupati Kulon Progo dan PJ Walikota Yogyakarta pada Senin, 13 Mei 2024 di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY</p> <p>2. Terlaksananya Gladi Bersih Pelantikan PJ Bupati Kulon Progo dan PJ Walikota Yogyakarta serta Pelantikan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo dan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta pada Selasa 21 Mei 2024 di Bangsal Kepatihan Komplek Kepatihan Danurejan</p> <p>3. Terlaksananya Pelantikan PJ Bupati Kulon Progo dan PJ Walikota Yogyakarta serta Pelantikan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kulon Progo dan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta pada Rabu 22 Mei 2024 di Bangsal Kepatihan Komplek Kepatihan Danurejan</p> <p>Faktor Penghambat: tidak ada hambatan yang berarti</p> <p>Faktor Pendukung: kerjasama yang solid dan koordinasi yang baik antara OPD dan Kab/Kota</p>
9.1.2	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	50.000.000	92,50	92,50	0,00	46.219.050	92,44	45.563.250	91,13	1,31	Testimoni dari PPKK Fisipol UGM terkait Penyalangan Pembangunan di wilayah perbatasan	https://drive.google.com/file/d/1RAFKH5xJ5zT4YmxpTF706h8AucZpvxUo/view?usp=drive_link	DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	<p>1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Laporan Penyalangan Pembangunan di wilayah perbatasan : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Penyalangan Pembangunan di wilayah perbatasan</p> <p>- Terlaksananya Rapat Penyusunan Laporan Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY Tahun 2023</p> <p>-Terlaksananya koordinasi Penyusunan Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan DIY Tahun 2024</p> <p>-Terlaksananya koordinasi penyalangan pembangunan wilayah perbatasan di DIY</p> <p>-Terlaksananya Rapat Kerja Koordinasi Penyalangan Pembangunan di wilayah perbatasan di DIY</p> <p>-Terlaksananya Pembayaran belanja jasa tenaga ahli Penyalangan Pembangunan Wilayah Perbatasan di DIY</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>-Tidak ada hambatan yang berarti</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>-Kerjasama yang solid dan koordinasi yang baik antara OPD Pemda DIY</p> <p>-Efisiensi honor narsum 100.000, ATK 800, kertas cover 5.000</p> <p>-refocusing sebesar Rp 2.675.000</p>
9.2	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	99.999.700	79,00	79,00	0,00	76.861.800	76,86	70.919.416	70,92	5,94						
9.2.1	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	99.999.700	79,00	79,00	0,00	76.861.800	76,86	70.919.416	70,92	5,94	Pemda DIY memperoleh peringkat ke-6 (enam) ketertarikan e SPM Triwulan I Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/17bzR90ks1z2ZzTz9Gn_99apN3vUtDM3?usp=sharing	DIY	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO TATA PEMERINTAHAN	<p>1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan (DPA SIPD) : 2 Laporan dari 2 Laporan</p> <p>2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>3. Laporan Standar Pelaporan Minimal (SPM) : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan LPPD DIY Tahun 2023 :</p> <p>1. Penyusunan jadwal tahapan kegiatan penyusunan LPPD Tahun 2023</p> <p>2. Penyusunan Tim Pelaporan LPPD Tahun 2023</p> <p>3. Penyampaian penjelasan teknis penyusunan LPPD</p> <p>4. Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2023</p> <p>5. Asistensi Penyusunan LPPD</p> <p>6. Penyusunan Rancangan LPPD</p> <p>7. Desk Verifikasi Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2023</p> <p>8. Reviu Penyusunan LPPD (Rancangan) Tahun 2023 oleh Inspektorat</p> <p>9. Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu LPPD 2023</p> <p>10. Input data dan dokumen pendukung dalam aplikasi SILPPD</p> <p>11. Penyusunan Ringkasan LPPD Tahun 2023</p> <p>12. Penyerahan dokumen LPPD ke Ditjen Otda Kemendagri RI</p> <p>13. Evaluasi LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 oleh Timda</p> <p>Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2023 :</p> <p>1. Koordinasi dengan Tim Penerapan SPM DIY</p> <p>2. Pelaksanaan pembinaan berupa pendampingan dan monitoring penerapan dan pelaporan SPM kepada Perangkat Daerah</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan	
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)							Deviasi
																<p>3. Pengumpulan data Laporan Penerapan SPM DIY Tahun 2023</p> <p>4. Sosialisasi Permen PUPR 13 Tahun 2023 tentang SPM Bidang PUPR</p> <p>5. Penyempaan Laporan SPM DIY Tahun 2023</p> <p>Monev Penerapan dan Pelaporan SPM DIY Tahun 2024</p> <p>6. Pencermatan dan monitoring pelaporan SPM TW 1 melalui aplikasi SPM</p> <p>7. Pelaporan SPM TW 1 melalui aplikasi eSPM</p> <p>8. Fasilitasi Penerapan SPM Bidang Pendidikan dan Sosial</p> <p>9. Evaluasi SPM pada RAPBD Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023 Kab Sleman dan Kab. Kulon Progo</p> <p>10. Pencermatan dan monitoring pelaporan SPM DIY 6 Urusan TW II</p> <p>Faktor Penghambat:</p> <p>LPPD</p> <p>1. Data dukung IKK LPPD belum rilis, sehingga ada yang masih bersifat sementara</p> <p>2. Masih terdapat perbedaan persepsi penghitungan capaian kinerja urusan di LPPD</p> <p>3. Pengumpulan data dukung membutuhkan waktu lama</p> <p>4. Pemenuhan data kinerja masih ada yang mengabaikan aspek legalitas</p> <p>5. Terdapat capaian yang belum optimal dikarenakan IKK LPPD belum menjadi target kinerja OPD yang disupport dengan anggaran</p> <p>6. Serapan tidak sesuai perencanaan: Efisiensi anggaran (anggaran Kick Off seluruhnya memakai anggaran Bappeda, sisa at cost perjadi narasumber dan honor narsum pusat, dan ATK,)</p> <p>SPM</p> <p>1. Pendataan SPM yang telah dilaksanakan belum dapat menghasilkan data yang lengkap dan valid</p> <p>2. Pendataan SPM (Termasuk Update) memerlukan waktu lama terkait dengan banyaknya form-form tahapan SPM yang harus diisi</p> <p>3. Kurang lengkapnya pelaporan SPM oleh OPD pengampu misalnya pendanaan, anggaran dan permasalahan</p> <p>4. Form Tahapan Penerapan SPM 5 Urusan pada eSPM belum diisi/dilengkapi</p> <p>5. Serapan tidak sesuai perencanaan karena kebijakan Pengurangan Anggaran Cetak Buku Pergub SPM,</p> <p>Faktor Pendukung:</p> <p>LPPD :</p> <p>1. Koordinasi dan fasilitasi yang baik Tim Penyusun LPPD DIY dalam pelaksanaan kegiatan meliputi penyiapan data, kompilasi data, analisis data, penyusunan materi laporan, asistensi Pusat, pelaksanaan reviu, serta penyempaan laporan telah diserahkan sebelum batas waktu ketentuan penyerahan LPPD</p> <p>2. OPD responsif menyampaikan data dukung meski ada data yang masih bersifat sementara</p> <p>3. Pelaksanaan asistensi penyusunan LPPD secara kolaboratif dalam rangka penyamaan persepsi</p> <p>4. Verifikasi secara cermat atas penyampaian data kinerja oleh OPD, untuk yang belum sesuai agar diperbaiki kesesuaiannya berdasarkan definisi operasional</p> <p>SPM :</p> <p>1. adanya aplikasi e-SPM Kemendagri yang semakin terdapat/terupdate memudahkan pelaporan SPM</p> <p>2. Pendataan dilaksanakan memperhatikan ketersediaan data di OPD, dilaksanakan konsolidasi data secara rutin dengan mitra kerja.</p> <p>3. Pendataan Form Tahapan SPM (Termasuk Update) dilaksanakan satu tahun sekali</p> <p>4. Koordinasi dan komunikasi intensif dengan OPD Pengampu SPM</p> <p>5. Tim Penerapan SPM saling mengingatkan kewajiban pelaporan dan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan</p>	
9.3	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	197.522.000	93,00	93,00	0,00	183.287.000	92,79	182.326.025	92,31	0,48						
9.3.1	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	197.522.000	93,00	93,00	0,00	183.287.000	92,79	182.326.025	92,31	0,48	Dengan adanya kerja sama antara Kementerian Perdagangan RI dengan Bandiklat DIY maka telah bisa dilaksanakan pelatihan yang sangat bermanfaat di bidang perdagangan untuk ASN di Pemda DIY	https://drive.google.com/drive/folders/1mFEnLim4t5CLKZa5pN-VfT9Kksy7g?usp=sharing	DIY	SEKRETARIAT DAERAH - BIRO TATA PEMERINTAHAN	<p>1. Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi (DPA SPID) : 1 Dokumen dari 2 Dokumen</p> <p>2. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri : Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Kontribusi Asosiasi APPSI dan MPU : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>- selasa, 9 Januari 2024 : koordinasi pembahasan rencana kerja sama antara Pokda DIY dengan Pemda DIY tentang pengamanan objek vital</p> <p>- kamis, 11 Januari 2024 : koordinasi pembahasan rencana kerja sama antara Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan Pemda DIY tentang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi</p> <p>- rabu, 17 Januari 2024 : koordinasi pembahasan rencana kerja sama antara Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kementerian Kelautan RI dengan Pemda DIY</p> <p>- rabu, 31 Januari 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan Pemda DIY</p> <p>- selasa, 20 Februari 2024 : evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama</p> <p>- Jumat, 23 Februari 2024 : telah dilakukan iuran kontribusi asosiasi APPSI dan MPU</p> <p>- rabu, 6 Maret 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Pemda DIY dengan Perguruan Tinggi</p> <p>- Jumat, 15 Maret 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Pemkab Subang dengan Pemda DIY</p> <p>- selasa, 19 Maret 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Pemprov Kaltim dengan Pemda DIY</p>

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
10	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	1.265.000.000	23,57	23,57	0,00	298.170.400	23,57	179.716.050	14,21	9,36					<ul style="list-style-type: none"> - senin, 22 April 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Pemda DIY dengan universitas Sanata Dharma Yogyakarta - Jumat, 26 April 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara BPH migas dengan pemda DIY - Senin, 13 Mei 2024 : pembahasan draf rencana kerja antara Polda DIY dengan Pemda DIY - Selasa, 14 Mei 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Pemda DIY dengan PT Angkasa Pura I - Kamis, 13 Juni 2024 : pembahasan naskah kerja sama Pemda DIY dengan Kementerian Koperasi dan Ikatan Nootaris Indonesia - Jumat, 14 Juni 2024 : pembahasan rencana kerja sama antara Pemda DIY dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika <p>Faktor Penghambat: sangat susah untuk menghadirkan para anggota Tim TKKSD di rapat off line</p> <p>Faktor Pendukung: dengan adanya zoom, sekarang lebih cepat dalam pengkoordinasian proses penyusunan naskah kerja sama</p>
10.1	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	1.265.000.000	23,57	23,57	0,00	298.170.400	23,57	179.716.050	14,21	9,36					
10.1.1	4.01.10.5.01.0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	1.265.000.000	23,57	23,57	0,00	298.170.400	23,57	179.716.050	14,21	9,36	Perwakilan Kapanewon terkait Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB Kalurahan dengan tema Asesmen Pelaksanaan RBKal	https://tinyurl.com/AsesmenMei24	DIY	<p>BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina (DPA SIPD) : 1 Dokumen dari 7 Dokumen Fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RB Kalurahan pada 4 Kabupaten : 0 Laporan dari 1 Laporan Profil kalurahan lengkap : 0 Kalurahan dari 392 Kalurahan Koordinasi penyusunan pedoman SAKIP Kalurahan : 0 Rancangan Produk Hukum dari 4 Rancangan Produk Hukum Fitur E-SAKIP dan Reformasi Kalurahan pada Sistem Informasi Kalurahan : 0 Fitur dari 2 Fitur Sosialisasi Penguatan Peran Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan : 4 Kali dari 14 Kali Laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan : 0 Laporan dari 1 Laporan 	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 4 Kabupaten: 1 Laporan* - Tersusunnya rencana kerja kegiatan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan -Terakumpulnya data dan bahan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kalurahan -Tersusunnya dokumen kontrak kerja dengan tenaga ahli pendamping reformasi birokrasi kalurahan -Tersusunnya hasil koordinasi progres pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Kabupaten dengan hasil: Sleman, Kulon Progo dan Gunungkidul sudah terbentuk susunan timnya dan proses penetapan Perbup. Kabupaten Bantul dalam proses penetapan Tim. -Tersusunnya rancangan indikator 'assesment' kapanewon sebagai evaluator pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi kalurahan. - Teraksananya koordinasi kelompok kerja reformasi birokrasi kalurahan Pemda DIY dan Per Kabupaten di DIY melalui rapat koordinasi pada tanggal 26 Maret dengan hasil bahwa tindaklanjut terkait pembentukan tim di keempat Kabupaten sebagai berikut: 1) Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 471/CP/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan pada 27 Desember 2023 2) Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 53/KPTS/TIM/2024 tentang Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2024 3) Surat keputusan Bupati Sleman Nomor 12/Kep.DHA/A/2024 tentang Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Sleman yang ditetapkan pada 31 Januari 2024 4) Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditetapkan pada 6 Maret 2024 <p>*Sosialisasi Penguatan Peran Pemerintah Kalurahan/Kelurahan: 14 Kali</p> <ul style="list-style-type: none"> -Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Penguatan Peran Pemerintah Kalurahan/Kelurahan -Terkoordinasikannya rencana pelaksanaan sosialisasi penguatan peran pemerintahan kalurahan dengan tema pentingnya penguatan peran pemerintah kalurahan melalui optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan kalurahan, serta Penguatan Peran Pemerintah Kelurahan dengan tema Kelurahan Responsif dan Inklusif. - Teraksananya Sosialisasi Penguatan Peran Pemerintah Kalurahan/ Kelurahan yang merupakan kegiatan kolaborasi dengan legislatif dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut: a) pada tanggal 5 Februari dengan sasaran Kelurahan Baciro, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta bertempat di Ruang Abimanyu 2, Graha Yogyakarta melibatkan narasumber Perwakilan Legislatif dan Akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta b) pada tanggal 5 Februari dengan sasaran Perwakilan Dukuh Se-Kapanewon Semin bertempat di Ruang Pertemuan Utama Balai Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, melibatkan narasumber Perwakilan Legislatif dan Balai Pemerintahan Desa Yogyakarta c) pada tanggal 7 Februari dengan sasaran Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik				Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	<p>bertempat di Ruang Abimanyu 2, Grage Yogyakarta, melibatkan narasumber Perwakilan Legislatif dan Akademisi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta</p> <p>d) pada tanggal 7 Februari dengan sasaran Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta bertempat di Ruang Abimanyu 3, Grage Yogyakarta, melibatkan narasumber Perwakilan Legislatif dan Akademisi Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta</p> <p>*Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Keistimewaan Kapanewon / Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan: 1 Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan keistimewaan kapanewon / kemantren dan kalurahan / kelurahan pada tanggal 14 Maret dengan hasil rencana pelaksanaan rapat kerja forum komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dengan tema 'Jagongan Kalurahan' melibatkan unsur aparatur pemerintahan kalurahan, paguyuban Lurah dan Pamong serta masyarakat - Terlaksananya forum komunikasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan / kelurahan dan kapanewon / kemantren sebanyak 4 kali dengan jadwal sebagai berikut; <ol style="list-style-type: none"> 1) Raker Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Purwosari, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 24 Februari 2024 2) Raker Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Bendung, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 16 Maret 2024 3) Raker Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Ngampilan, Kemantren Ngampilan, Kota Yogyakarta pada tanggal 19 Maret 2024 4) Raker Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan di Kalurahan Tanjungharjo, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 23 Maret 2024 <p>*FGD Penyusunan Pedoman SAKIP Kalurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Persiapan FGD Penyusunan Pedoman SAKIP Kalurahan - Terlaksananya koordinasi lintas sektor Persiapan FGD Pedoman SAKIP pada tanggal 22 Maret 2024 - Terlaksananya kegiatan FGD penyusunan pedoman SAKIP pada tanggal 28 Maret 2024, menghadirkan narasumber dari Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Wilayah Yogyakarta dan Pakar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari STPMD/APMD <p>*Koordinasi Penyusunan Pedoman SAKIP Kalurahan : 1 Laporan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja FGD Pedoman SAKIP Kalurahan - Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam rangka rapat persiapan FGD SAKIP pada tanggal 6 Mei 2024 - Terlaksananya kegiatan FGD Pedoman SAKIP Kalurahan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan narasumber dari Balai Pemerintahan Desa Kemendagri Wilayah Yogyakarta dan Pakar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari STPMD/APMD dengan sasaran 30 peserta yang terdiri dari OPD pengampu RBKai serta OPD Kabupaten pengampu RBKai <p>*Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB Kalurahan : 1 dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Kerangka Acuan Kerja Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB Kalurahan - Terkoordinasinya rancangan Kerja Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB Kalurahan dengan tema sosialisasi juknis RKal dan assesmen RBKai - Terlaksananya sosialisasi juknis RKal dengan narasumber Pakar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari STPMD/APMD dengan sasaran tim RBKai Kabupaten (2 Kabupaten) dan seluruh Kapanewon di 2 Kabupaten yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal: d <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal 13 Mei 2024 pelaksanaan Kabupaten Kulon Progo 2) tanggal 15 Mei 2024 pelaksanaan Kabupaten Sleman <ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya assesmen RBKai dengan narasumber Pakar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari STPMD/APMD dengan sasaran seluruh jawatan preja Kapanewon di 2 Kabupaten yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal : <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal 14 Mei 2024 pelaksanaan Kabupaten Kulon Progo 2) tanggal 16 Mei 2024 pelaksanaan Kabupaten Sleman <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi honorarium narasumber FGD Pedoman SAKIP Kalurahan sebesar Rp400.000 - Efisiensi honorarium narasumber Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB Kalurahan sebesar Rp1.600.000 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dukungan Pemerintah Kabupaten dalam tindaklanjut Pergub Reformasi Kalurahan -Kesiediaan waktu dan penyampaian materi yang selaras dengan tema KAK oleh narasumber - Kehadiran peserta dan keaktifan dalam pelaksanaan FGD, Sosialisasi dan Asesment

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		Jumlah	4.388.371.500	54,74	54,74		2.383.836.800	54,32	2.042.796.298	46,55						